

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Customer Perspectives		
1 Terwujudnya <i>good governance</i> dan <i>clean government</i>	1 Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi	75 Nilai
	2 Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan HOH (skala 1-5)	3,6 Nilai
2 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas produk hukum	3 Jumlah peraturan perundang – undangan di bidang SPK	2, 2 PP, RPerPres
Internal Process Perspectives		
3 Terlaksananya Manajemen ASN BSN untuk mewujudkan SDM yg Profesional	4 Persentase pemenuhan kebutuhan ASN BSN	77 %
	5 Jumlah Dokumen Pengukuran Kompetensi ASN BSN	2 Dokumen
	6 Jumlah SOP Pengelolaan Kepegawaian	7 Pedoman/ SOP
	7 Persentase ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	85 %
	8 Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis	85 %
	9 Prosentase ASN dg Nilai Prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yg bernilai cukup	90 %
	10 Jumlah Dokumen Pembentukan JFT Analisis Standardisasi	2 Dokumen
	11 Persentase Penetapan Kenaikan Pangkat	100 %
	12 Persentase pegawai yg mendptkan Kenaikan Gaji Berkala	100 %
	13 Persentase penyelesaian Usulan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	>95 %

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4 Terselenggaranya program penataan Organisasi dan Tata Laksana sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi	14 Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	100 %
	15 Persentase kegiatan penataan organisasi (restrukturisasi organisasi)	60 %
5 Tersedianya peraturan perundangan-undangan di bidang SPK	16 Persentase peraturan perundang – undangan di bidang SPK yang ditetapkan	81 %
	17 Jumlah kajian peraturan perundang – undangan yang diselesaikan	3 Kajian
	18 Persentase waktu penyelesaian SK Penetapan SNI	100 %
6 Terselenggaranya layanan Pengembangan Hukum, Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum	19 Persentase pemberian bantuan hukum	60 %
	20 Jumlah Penyuluhan Hukum bidang SPK	6 Kali
	21 Persentase Peraturan Perundangan yang diunggah	75 %
7 Terinformasikannya Kebijakan, Program, Kegiatan dan Hasil – Hasil BSN Kepada Masyarakat	22 Jumlah pemberitaan SNI dan BSN	1100 berita
	23 Jumlah Pameran standardisasi yang diikuti BSN	6 Kali
	24 Jumlah Koordinasi Kelembagaan baik internal maupun dengan K/L, Pemerintah daerah, serta stakeholder lainnya.	19 Kali
	25 Jumlah Publikasi Kelembagaan	1 Laporan
	26 Persentase pertanyaan Publik tentang BSN yang direspon ULIP	90 %
Learning and Growth Perspectives		
8 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi HOH yang profesional	27 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) HOH yang meningkat kompetensinya	100 %
	28 Realisasi anggaran HOH	≥95 %
	29 Jumlah <i>e-governance</i> yang mendukung tata kelola HOH	7 Aplikasi
	30 Penerapan Sistem Manajemen Mutu	100 %

Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN	9,613,110,000
2 Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	4,699,136,000
Jumlah	<hr/> 14,312,246,000

Pihak Kedua



Puji Winarni

Jakarta, Maret 2016
Pihak Pertama



Budi Rahardjo